

Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024

Taupik Hidayat

Anggota PPK Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Indonesia

Email : vespataufik2@gmail.com

Abstrak

Demokrasi Nasional adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat melalui partisipasi politik aktif dan pengambilan keputusan kolektif. Penyelenggaraan pemilu merupakan instrumen fundamental dalam mendorong pemilu yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fakta demokrasi nasional dan prediksi menuju pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan kombinasi antar referensi serta pembacaan data yang detil. Dengan mengandalkan bibliografi seperti artikel ilmiah dan buku yang arelevan dengan tajuk pembahasan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fakta demokrasi nasional penyelenggaraan pemilu 2024 merupakan instrumen fundamental dalam mendorong pemilu yang berkualitas. Maka penting pemilu diselenggarakan dengan kesadaran yang tinggi bahwa satu-satunya cara untuk melahirkan pemimpin yang baik adalah dengan menjalankan proses yang baik, sehingga jangan salah ketika tuntutan integritas pemilu terus melonjak di manapun. Kemudian prediksi pemilu 2024 pemilihan Nasional 2024 pengalaman politik dengan penonjolan isu identitas agama (Islam) dalam Pemilihan Nasional Indonesia 2014 dan 2019 menjadi ancaman serius bagi kesatuan bangsa Indonesia menghadapi Pemilu 2024. Apalagi dalam Pemilu tahun 2024, Presiden Jokowi tidak lagi mencalonkan diri sehingga sangat dikhawatirkan pemenang pilpres adalah calon presiden yang diusung oleh pihak pendukung radikalisme. Harapannya betapa penting partisipasi generasi millennial, Bawaslu mampu mengawal kontestasi dan melaksanakan sosialisasi tentang peran penting pemuda dengan mengundang pemuda dari berbagai instansi, berikut dokumentasi pelaksanaan sosialisasi peran pemuda dalam pemuli serentak 2024.

Kata kunci: Demokrasi Nasional, Pemilu 2024.

Elections in 2024: National Democracy Situation

Abstract

National Democracy is a system of government in which political power resides in the hands of the people through active political participation and collective decision-making. The holding of elections is a fundamental instrument in promoting quality elections. This study aims to look at the facts of national democracy and predictions towards the 2024 elections. This research uses a literature study approach and a combination of references and detailed reading of data. By relying on bibliographies such as scientific articles and books that are relevant to the topic of discussion. The results of this study indicate that the fact of national democracy holding the 2024 elections is a fundamental instrument in pushing for quality elections. So it is important that elections are held with a high awareness that the only way to produce good leaders is by running a good process, so don't be mistaken when demands for election integrity continue to soar everywhere. Then the prediction of the 2024 National

Election 2024 political experience with the prominence of the issue of religious identity (Islam) in the 2014 and 2019 Indonesian National Elections is a serious threat to the unity of the Indonesian nation in facing the 2024 Election. is a presidential candidate endorsed by radicalism supporters. It is hoped that how important the participation of the millennial generation is, Bawaslu will be able to oversee contestation and carry out outreach about the important role of youth by inviting youth from various agencies, along with a series of implementations of socializing the role of youth in 2024.

Keywords: *National Democracy, Election in 2024.*

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyelenggara ketatanegaraan bangsa terus mencari formulasi ideal untuk mendorong proses demokrasi di Indonesia, hingga kini telah dibentuk berbagai lembaga dan regulasi sebagai infrastruktur demokrasi. Proses dan kelangsungan demokrasi juga penting, jika ada partisipasi publik dan lembaga-lembaga independen yang memiliki reputasi menegakkan demokrasi. Kita belajar dari tataran demokrasi di tingkat nasional maupun daerah bahwa masih banyak proses demokrasi yang menyimpang dari esensi demokrasi yang sebenarnya, hal ini ditandai dengan proses kontestasi hasil pemilu sendiri di Mahkamah Konstitusi (MK), itu berada di Mahkamah Konstitusi bahwa jalur konstitusional diambil untuk menemukan jalan keadilan yang diyakini oleh para kontestan (Yusrin & Salpina, 2023).

Refleksi pada Pilkada serentak 2020 yang telah diterima di mahkamah Konstitusi, sebuah catatan serius dalam sejarah demokrasi kita, belajar sejarah demokrasi adalah bagian terpenting sebagai landasan epistemik untuk terus menentukan masa depan. jalan demokrasi ke depan. Fase demokrasi ini tidak terlepas dari proses evaluasi dan perumusan agenda demokrasi yang ideal. Terkait dengan proses evaluasi demokrasi, tidak lepas dari kajian-kajian kritis dalam ruang-ruang demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin ideal di negeri ini dari berbagai tingkatan, sehingga kita benar-benar hidup dalam sistem politik negara yang modern (Perdana, *et.al.*, 2019).

Lintasan sejarah demokrasi kita banyak mencatat duka, belum lagi data yang teridentifikasi dan dirilis KPU melalui Arif Budiman menyebutkan 894 pejabat meninggal dunia dan 5.175 pejabat sakit. Mayoritas publik angkat bicara tentang permasalahan yang dialami penyelenggara termasuk sorotan dari Komnas HAM dan memasukkan masukan kepada KPU untuk mendorong regulasi agar bisa memanfaatkan sistem e-voting atau penghitungan suara secara elektronik, ini berbasis dan juga paling banyak. bagian penting dalam transformasi cepat ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, permasalahan Pemilu 2019 yang dihadapi penyelenggara seolah menjadi bagian dari rutinitas yang berulang, seperti masalah distribusi logistik pemilu yang lambat di beberapa daerah, pendataan, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu banyak. tinggi, data hasil penghitungan suara, serta penggerebekan hasil akhir pemilihan presiden (Gleko, *et.al.*, 2017).

Dinamika ketenangan di negeri ini yang selalu diwarnai dengan aroma saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Tak hanya itu, pendapat Muhtadi bahwa fenomena politik yang selalu mengedepankan saling serang muncul di permukaan, sementara dialektika gagasan yang terlempar begitu saja terkubur, alih-alih munculnya ketidakpuasan terhadap proses pemilu selalu sampai ke meja Konstitusi. Mahkamah (MK), dari tingkat nasional dan daerah MK adalah jalan yang selalu ditempuh. Setidaknya 3 (tiga)

alasan utama munculnya praktik politik uang (*money politic*) dalam pemilu, yaitu: (i) *Patron-Client*, *Poverty Factor*, *Low Party-ID*. Apakah ini gambaran bahwa demokrasi belum saling menerima hasil? Hal yang dicari adalah keadilan absolut, sehingga pemilu berikutnya benar-benar ketat dan menghasilkan pemimpin yang demokratis tanpa saling tuduh. Belum lagi pendekatan ilmu politik berperan penting dalam demokrasi, baik kontribusi lembaga survei yang kompeten semuanya dalam pusran demokrasi, pemaknaannya ambigu karena demokrasi bisa disandera oleh lembaga survei atau lembaga survei memberi dimensi pencerahan bagi pemilih perilaku di Indonesia (Amir, 2024).

Buktinya, di Indonesia sendiri, demokrasi ini adalah jalan dan mekanisme proyek peradaban yang sangat baik. Demokrasi menghabiskan anggaran negara yang besar, belum lagi proses politik yang rentan transaksional. Politik uang kini digembar-gemborkan oleh elit politik, akibat tingginya pragmatisme pemilih, dan ini menjadi momok bagi dunia demokrasi. Hingga berbagai pihak memberikan sanksi dan bahkan jika pada praktik politik. Regulasi dan moralitas mengikat dalam politik dunia, tetapi selalu ada cara untuk mengabaikannya. Pasca reformasi, demokrasi kita sudah sangat terbuka dan perlahan menunjukkan kualitas demokrasi, namun tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa demokrasi perlu pencerahan serius, karena proses transaksional terus berubah bentuk (*bunglon*) (Isra, *et.al.*, 2021).

Misalnya, tudingan jual beli suara hanya diberi waktu tiga hari untuk membuktikannya. Tentu saja, waktu yang singkat ini menjadi tantangan untuk membuktikan praktik politik uang di tingkat akar rumput. Muhtadi, (2013). Muhtadi (2019) sistem proporsional terbuka berkontribusi terhadap maraknya politik uang karena kandidat dipaksa untuk bertarung antar sesama kandidat dalam satu partai untuk mengejar suara pribadi. Selain itu, masalah DPT belum selesai poin tamunya, sehingga sistem pengesahan DPT melalui layanan e-KTP, tanpa harus memenuhi proses undangan pemilih yang sangat administratif, belum tentu demokrasi.

Mengapa demikian karena peninjauan kasus seperti jual beli suara (pemanggilan pemungutan suara) yang terjadi di beberapa daerah tak terhindarkan. Perihal yang juga menjadi polemik di tingkat administrasi, masyarakat dengan e-KTP tidak diperbolehkan mencoblos karena tidak memiliki surat undangan, sedangkan di daerah lain petugas KPPS memperbolehkan pemilik e-KTP untuk mencoblos tanpa harus memiliki surat undangan. Maka dari pengertian dan peristiwa yang terjadi maka inovasi rasional aturan dan tahapan pemilihan menjadi penting dalam masyarakat, agar ilmu dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik .

Fungsi lembaga seperti KPU dan Bawaslu dibentuk sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu hingga ke tingkat daerah. Saat ini semua tahapan dan regulasi telah dikembangkan untuk mendukung regulasi baik KPU maupun Bawaslu yang bertujuan agar proses demokrasi ini berjalan berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, tentunya bukan hanya asas yang menjadi slogan belaka, itu harus benar-benar hidup dalam semangat demokrasi kita (Yusuf, 2010). Meski proses penyelenggaraannya penuh dengan dinamika yang panjang dan permasalahan daerah yang beragam, bahkan pengaturan regulasi tentang pemilu itu sendiri tidak berlaku sama di semua daerah, kita bisa mempelajari kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 di Kabupaten Teluk Bintuni .

Pada situasi ini MK mengabulkan permohonan perlindungan pemilu tersebut. Teluk Bintuni diusulkan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Petrus Kisihw dan Matret Kokop.

Dan yang membatalkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan kesepakatan (noken) adalah Mahkamah Konstitusi. Dari peristiwa politik di Teluk Bintuni ini bisa menjadi perhatian dan pengetahuan demokrasi di tanah Papua-Papua Barat, karena payung dan instrumen undang-undang pemilu sama dan adil, karena di provinsi Papua sistem noken atau sara berdasarkan keputusan bersama tidak diadili selama di Papua Barat bermasalah/dibatalkan.

Mencermati permasalahan demokrasi sebelumnya, penting bahwa demokrasi futuristik adalah demokrasi yang dibangun atas dasar partisipasi dan kolaborasi dari masyarakat. Inovasi terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Libatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Kolaborasi, instrumen demokrasi yang baik dan sehat harus dihidupkan kembali, apalagi proses pemilu kita masih dalam tahap pandemi yang belum selesai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan kombinasi antar referensi serta pembacaan data yang detil. Telaah dan analisa integratif yang di kemas dengan hasil penelitian yang objektif. Penelitian ini mengandalkan bibliografi seperti artikel ilmiah dan buku yang relevan dengan tajuk pembahasan (Assingkily, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024

Kajian sosiologi kita tentang kredibilitas dan integritas adalah hal-hal yang berkaitan dengan nama baik dan reputasi seseorang dalam menjalankan aktivitas profesionalnya. Namun, rekam jejak bukan hanya masalah profesional, tetapi lebih dari kualitas pribadi seseorang dan indikator ini digunakan sebagai acuan dalam melihat kemampuan untuk menjalankan amanah dalam suatu profesi tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu akan dituntut benar-benar sebagai penyelenggara yang kredibel dan berintegritas, meski diketahui bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia kerap mendapat stereotype tentang kemerdekaan. banyak sekali peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan pilkada, namun tanpa dilengkapi dengan orang-orang yang kredibel dan berintegritas, demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik (Yusuf, 2010).

Belum lagi kita memiliki jejak sejarah sistem politik negara kita selama 32 tahun, terbilang dari praktek-praktek demokrasi, pasca reformasi menetapkan pemilihan umum secara langsung, bebas dan rahasia (berlimpah) dan jujur & adil (jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan dituangkan dalam prinsip-prinsip pemilu. Ketegasan dan amanat konstitusi harus benar-benar dijalankan, meski mengalami dinamika yang tidak muda. itu terjadi berulang-ulang. Pemikiran modern yang hampir tidak ada tanpa proses pemilu yang bebas, rata-rata pemilih seringkali dijunjung tinggi oleh elite kekuasaan. sistem demokrasi yang berkualitas dimiliki dengan cara yang sulit dibayar dan sumber daya yang unggul semakin memburuk di setiap periode (Samosir & Novitasari, 2022).

Penyelenggaraan pemilu merupakan instrumen fundamental dalam mendorong pemilu yang berkualitas. Maka penting pemilu diselenggarakan dengan kesadaran yang tinggi bahwa satu-satunya cara untuk melahirkan pemimpin yang baik adalah dengan menjalankan proses yang baik, sehingga jangan salah ketika tuntutan integritas pemilu terus melonjak di mana pun. Rozali Abdullah (2008) memberikan analisis kritis untuk

menciptakan pemilu yang berkualitas yaitu pemilu yang demokratis, jujur dan adil yang dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang rela memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi bukan hanya dengan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilu (Marzuki, 2008).

Bank juga harus membenahi sistem pemilu itu sendiri sehingga benar-benar memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, terbuka, bebas dan rahasia, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga ini harus dilakukan dengan sistem pemilu yang baik dan penyelenggara yang kredibel, berintegritas, independen dan transparan. Kami sangat menuntut kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu yang berintegritas, namun semua itu harus didahului dengan proses dan tahapan seleksi yang berkualitas dan bermoral. Latar belakang (*track record*) tim seleksi, prinsip-prinsip ideal dalam menentukan tim seleksi harus menjadi perhatian utama agar arah demokrasi menuju jalur yang mapan dan berkualitas, sehingga tercapai negara yang bersih dan berkualitas lorong.

Setidaknya melekat pada sikap profesionalisme, kemandirian, transparansi efisiensi, Pelayanan dan Integritas merupakan hal yang penting dalam penyelenggara pemilu, oleh karena itu betapa pentingnya proses seleksi penyelenggara pemilu diharapkan benar-benar bersih dari kepentingan apapun, padahal bukan rahasia umum bagi seorang penyelenggara yang terpilih melalui jalur proses negosiasi politik yang membutuhkan kepentingan. Selama ini yang terlihat proses pemilu berjalan dengan baik, namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki, apalagi apresiasi terhadap pemilu terus berlanjut, namun di daerah-daerah tertentu proses demokrasi kita sudah menjadi demokrasi dan spillover.

Harapan masyarakat, demokrasi berjalan baik tanpa menimbulkan pertumpahan darah, khususnya di tanah Papua. Penting bahwa pemilu tidak dapat dipisahkan dari agenda demokrasi, sedangkan demokrasi adalah bagian terpenting dari peradaban manusia saat ini, suatu sistem dan mekanisme yang beradab yang harus kita junjung dan junjung tinggi, karena semua jalan demokrasi yang dipilih bukan semata-mata mayoritas sebagai pemenang dan minoritas sebagai manusia merugi, tapi lebih pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Siklus kesejahteraan telah mencapai salah satu titik temunya di hati penyelenggara pemilu yang kredibel dan berintegritas.

Prediksi Pemilihan Nasional 2024

Pengalaman politik dengan menonjolnya isu identitas keagamaan (Islam) dalam pemilu Warga Negara Indonesia tahun 2014 dan 2019 menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa Indonesia menghadapi Pemilu 2024. Apalagi pada Pemilu 2004, Presiden Jokowi sudah tidak ada lagi mencalonkan diri sehingga pemenang pemilihan presiden yang sangat dikhawatirkan adalah calon presiden digunakan oleh para pendukung negara Khilafah. Jika itu terjadi maka nasib kalangan minoritas akan semakin terancam, dan benih-benih demokrasi yang menghargai martabat manusia meskipun berbeda suku dan agama, akan semakin sulit untuk tumbuh sehat di Indonesia (Yusrin & Salpina, 2023).

Saran dari artikel ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut ke sejumlah bidang lain untuk apakah benar-benar memperkuat identitas politik yang berkembang di Indonesia? Misalnya, apakah ada kandidat yang beragama Islam dan benar-benar menang atas dasar agama? Diperlukan studi demokrasi yang lebih luas, termasuk mencari tahu bagaimana

masa depan demokrasi Indonesia pada pemilu 2024 dan setelahnya politik identitas yang sangat buruk pada pemilu 2014 dan 2019.

Di tengah isu politik identitas yang pernah panas 2014 dan 2019, apa yang membuat para pemilih Muslim menjatuhkan pilihan demokrasi pada politisi beragama Kristen? Ada wawancara mendalam sejumlah pemilih beragama Islam. Mereka adalah Abah Abidin (73 tahun) Koordinator Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) se Kabupaten Sukabumi dan Haji Didi Supriadi (56 tahun) penduduk Kelurahan Mundusari Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan-Subang. Memang benar apa yang dikatakan Alan Ware jika potensi individu tersebut layak dijual kepada pemilih dan mampu membelinya meningkatkan perolehan suara partai politik, maka posisi partai tidak lagi dominan (Yusrin & Salpina, 2023).

Argumentasi pemilih Muslim dapat digolongkan menjadi lima alasan, yaitu: pertama, kemampuan caleg yang bersangkutan untuk meminta ganti rugi dan mampu merebut hati warga nuansa tata krama agama dan budaya setempat; kedua, karena calon yang bersangkutan adalah bagian dari korban Orde Baru karena terkait dengan PKI sehingga mereka berunjuk rasa dukungan dari Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba); ketiga, kesediaan calon kristen untuk memberikan pengobatan terbuka gratis kepada seluruh warga yang terus dilakukan setiap bulan hanya terikat kursi pemilihan; keempat, pendekatan pembangunan fisik fasilitas umum seperti masjid, air minum, jalan; kelima, kemampuan mendekati sejumlah tokoh pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah sekaligus dengan memanfaatkan mobil partai (Samosir & Novitasari, 2022).

Tentu saja teori Affan Gaffar bahwa politik aliran masih sangat kuat di Indonesia sebagai preferensi pilihan dapat dikatakan tidak sepenuhnya dapat diterima. Dari analisis Penelitian Affan Gaffar di kawasan Brobanti, Yogyakarta memperkuat teori yang ada hubungan yang sangat erat antara orientasi dan preferensi sosial-keagamaan individu pilihan. Data dari Brobanti juga mendukung anggapan yang membuat warga tertarik memilih tergantung pada orientasi sosial-keagamaan mereka. Sehingga siswa akan tertarik memilih partai Islam, sedangkan Abangan cenderung mendukung partai sekuler yang dalam pemilihan. Gaffar menjelaskan bahwa stabilitas pola preferensi pilihan terlihat jelas dalam analisis ini.

Selain itu pemilih dari santri tampaknya lebih ideologis dalam membuat keputusan pilihan dari Abangan. Buktinya, pemilih muslim tetap menentukan pilihan politik bagi pemilih kandidat Kristen meski identitas politiknya sangat kotor terjadi pada pemilu yang sama. Ribka Tjiptaning, seorang legislator wanita beragama Kristen Pemilu 2014 dan 2019 di Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat dicintai dan dipilih rakyat muslim justru ketika ribka terang-terangan mengaku sebagai keturunan pengikut Partai Komunis tahun 1955. Ikatan emosional sangat tepat seperti dijelaskan oleh Clifford Geertz bahwa aspek politik bila dicampur dengan aspek lainnya primordialisme adalah sesuatu yang sangat sulit dipisahkan. warga Desa Cicolawing sudah sangat melekat kuat pada Ribka seperti yang dimaksudkan oleh Clifford Geertz. Padahal di Desa Cicolawing Kecamatan Pawira sekitar 99,99% (Sudrajat, 2019).

Pesta demokrasi 2024 harus bisa berbenah dan belajar dari semangat inovasi itu sendiri, perlu untuk menguatkan daya kreatifitas penyelenggaran dengan segala pelayanannya. Misalnya pelayanan di saat perhitungan suara menggunakan atribut adat daerah tertentu hal ini dilakukan sebagai daya tarik para pemilih untuk ikut serta dalam menentukan hak politik. Begitupun dengan maskot penyelenggaran senantiasa

menggunakan simbol-simbol lokal yang menggambarkan tentang nilai-nilai kearifan lokal, tapi semua inovasi bukan saja berakhir pada episode itu.

Dengan demikian, cita-cita penyelenggaraan pemilu yang kredibel dapat tercapai, yakni pemilu yang jujur dan adil. Untuk menjamin berkembangnya demokrasi yang terkonsolidasi, upaya ini dilakukan dalam rangka peningkatan demokrasi. Tidak diragukan lagi, sangat tepat bagi kaum muda untuk melakukan tugas-tugas pengawasan partisipatif di dunia teknologi dan informasi yang berkembang pesat saat ini. Munculnya beragam aplikasi dengan pola digitalisasi yang berbeda merupakan bukti perubahan dan kemajuan yang menakjubkan. Teknologi sistem informasi digital yang digunakan dalam pemilu juga terus ditambah oleh penyelenggara pemilu. KPU dilengkapi dengan Sistem Data Pemilih (Sidalih), Sistem Partai Politik (Sipol), Sistem Dana Kampanye (Sidakam), Sistem Rekapitulasi (Sirekap), Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dan Bawaslu dilengkapi dengan aplikasi pemantau Gowaslu (Mushaddiq Amir, 2024).

Mengingat betapa pentingnya partisipasi generasi millennial, Bawaslu Bener Meriah melaksanakan sosialisasi tentang peran penting pemuda dengan mengundang pemuda dari berbagai instansi, berikut dokumentasi pelaksanaan sosialisasi peran pemuda dalam pemilu serentak 2024. Harapan besar untuk mendorong partisipasi publik adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat, khususnya kalangan muda, dalam mengelola rencana lima tahun pesta demokrasi untuk pemilu serentak 2024 yang semakin dekat. Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa kaum muda adalah warga negara yang berperan sebagai peran penting dalam membentuk masa depan bangsa dan negaranya. Agar pemuda dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif dalam pemilu serentak 2024, mereka harus melanjutkan semua ini. Ini akan memungkinkan mereka melakukan lebih dari sekadar menonton acara demokrasi atau memberikan suara. Tentu, upaya ini untuk menghasilkan pemilu yang kredibel. Ada banyak aspek siklus pemilu yang penting untuk diperhatikan.

Ketika data pemilih sedang diperbarui, misalnya. Pengawas sekarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nama-nama orang yang memenuhi kriteria untuk memilih terdaftar sebagai pemilih. Tahap nominasi adalah tahap berikutnya, di mana supervisor diharuskan memastikan bahwa profil kandidat yang mencalonkan diri sudah sesuai. Belum lagi masa kampanye yang menuntut pengawasan publik secara langsung terhadap bahan-bahan yang digunakan para calon pejabat. Berikutnya adalah fase penentuan yang dikenal dengan pencoblosan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, yang sangat penting untuk dipahami oleh generasi muda agar mereka tidak hanya memilih tetapi juga menjadi pengawas pemilu karena banyaknya TPS di Indonesia. Jika ada laporan dari masyarakat umum atau kesimpulan dari pengawasan partisipatif di mana saja, Bawaslu akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang relevan.

Namun, tidak mudah untuk membuat gerakan sambil terlibat dalam pengawasan partisipatif dengan kaum muda. Masalah terkait pemilu umumnya tidak menarik minat anak muda. Pemuda sebenarnya tidak tertarik karena politik masih memiliki kualitas yang buruk dan tidak cukup banyak pemuda di pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan pemilu 2024 sebagian akan bergantung pada keterlibatan politik kaum muda. Ada berbagai cara agar anak muda benar-benar terlibat dalam politik dan penyelenggaraan pemilu. Voting adalah peran besar pertama yang dapat diambil kaum muda dalam politik. Kaum muda dapat berpartisipasi dalam proses pemilu dengan membuat keputusan berdasarkan

informasi dengan menyadari topik yang dipertaruhkan dalam pemilu dan hak mereka untuk memilih.

Pemuda dapat berperan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, desa, dan kelurahan, seperti halnya pada poin kedua. Ketiga, mencalonkan diri. Dari pusat hingga provinsi, anak muda bisa langsung berkontribusi dengan mencalonkan diri. Melalui ini, kaum muda akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi politik dan memajukan tujuan-tujuan penting. Keempat, bergabung dengan tim pemenangan bagi calon yang mencalonkan diri untuk jabatan legislatif atau eksekutif. Dengan bergabung dalam tim pemenangan, generasi muda akan belajar tentang dinamika politik dan elektoral, yang nantinya akan berguna bagi proses pembangunan demokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa fakta demokrasi nasional penyelenggaraan pemilu 2024 merupakan instrumen fundamental dalam mendorong pemilu yang berkualitas. Maka penting pemilu diselenggarakan dengan kesadaran yang tinggi bahwa satu-satunya cara untuk melahirkan pemimpin yang baik adalah dengan menjalankan proses yang baik, sehingga jangan salah ketika tuntutan integritas pemilu terus melonjak di manapun. Kemudian prediksi pemilu 2024 pemilihan Nasional 2024 pengalaman politik dengan penonjolan isu identitas agama (Islam) dalam Pemilihan Nasional Indonesia 2014 dan 2019 menjadi ancaman serius bagi kesatuan bangsa Indonesia menghadapi Pemilu 2024. Apalagi dalam Pemilu tahun 2024, Presiden Jokowi tidak lagi mencalonkan diri sehingga sangat dikhawatirkan pemenang pilpres adalah calon presiden yang diusung oleh pihak pendukung radikalisme. Harapannya betapa penting partisipasi generasi millennial, Bawaslu mampu mengawal kontestasi dan melaksanakan sosialisasi tentang peran penting pemuda dengan mengundang pemuda dari berbagai instansi, berikut dokumentasi pelaksanaan sosialisasi peran pemuda dalam pemilu serentak 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, P. B. M. S., Liando, F. D. M., Nugroho, K., Sukmajati, M. U. P., Tanthowi, T., & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Gleko, P., Suprojo, A., Lestari, A. W., & İlköğretim, Y. (2017). "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah" *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 38–47. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>.
- Isra, G., Fridawati, P. I., & Masrurroh, H. (2021). "Pemilu 2024: Pesta Demokrasi Akbar Pembangkit Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi" *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(8), 751–757. <https://doi.org/10.17977/um063v2i82022p751-757>
- Marzuki, S. (2008). "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk Pemilu yang Demokratis" *JURNAL HUKUM*, 3(15), 393–412. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/32>
- Mushaddiq, A. (2024). "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2),

115–131.

- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). "Hak Politik Warga Negara dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024" *JIHHP*, 2(3), 332–346. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Sudrajat, T. (2019). "Analisis Komparatif Pengaturan Dimensi Organisasi" *Jurnal Ilmu Administrasi*, XIV(2017), 51–68. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). "Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024" *Journal on Education*, 05(03), 9646–9653.
- Yusuf, A. (2010). "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik" *GaneÇ Swara*, 4(1), 13–16. <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/3.-M.-Yusuf-A.R.pdf>